PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ENCEP SUDARWAN**
2. Jabatan : **DIREKTUR PERUMUSAN KEBIJAKAN KEKAYAAN NEGARA**
3. NHK : **25699**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — Rp. 6.141.135.784

1. Tanah dan Bangunan Seluas 157 m2/394 m2 di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI Rp. 1.449.034.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 252.802.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 214 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 985.318.784
4. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/140 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 2.032.100.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/54 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 142.096.000
6. Tanah Seluas 257 m2 di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI Rp. 91.785.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 148 m2/200 m2 di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI , Rp. 750.000.000
8. Tanah Seluas 5.437 m2 di KAB / KOTA GARUT, Rp. 438.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN — Rp. 400.000.000

1. MOBIL, HONDA MOBILIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOBIL, HONDA CR-V Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000

C.	HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	380.560.000
D.	SURAT BERHARGA	Rp.	702.700.000
E.	KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.091.800.157
F.	HARTA LAINNYA	Rp.	----
	Sub Total	Rp.	10.716.195.941
III.	HUTANG	Rp.	19.000.000
IV.	TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	10.697.195.941

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.